

Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purworejo

Oleh:

Rika Mandhega Vimastalia, Dyah Hariani, Hesti Lestari

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Purworejo tourism sector is supported by the availability of natural and other potential. Purworejo government has set a Regional Regulation No. 4 of 2009 where there are six tourist attractions that are a priority for development, among others: Jatimalang Beach, Seplawan Cave, Gegermenjangan Hill Resort, The Sign of WR. Soepratman, Keburuhan Beach, and Museum Tosan Aji. The problem faced are the condition of tourism that are not experiencing significant development, what factors inhibiting and supporting the development of tourism and how the strategy of tourism development in Purworejo. This research uses theories of strategic management, and SWOT analysis to identifying strengths, weaknesses, opportunities, threats, and strategic issues. The type of this research is qualitative descriptive. In conclusion, there are eight strategic issues of Purworejo tourism development. By using Litmus Test to evaluate these issues, there are six development strategies. The most strategic issue is cooperation with various business sectors.

Keywords: *Strategy, Tourism SWOT Analysis*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara menentukan perolehan devisa yang diterima. Menyadari peran vital pariwisata, pemerintah pun berupaya membuat kebijakan dan program pendukung kegiatan kepariwisataan.

Tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kebijakan

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata diperlukan visi yang sama dan keterpaduan antarsektor sebagai prasyarat utama dalam mendukung pembangunan pariwisata. Pemerintah juga telah menetapkan tiga sektor prioritas pembangunan, meliputi: pariwisata, ekonomi kreatif, dan tenaga kerja (Widiatedja, 2010:71).

Saat ini sektor pariwisata di Indonesia ditangani oleh masing-masing daerah. Pemerintah pusat mengurangi campur tangannya dikarenakan Indonesia telah mengemban Otonomi Daerah yang bersifat desentralistik. Di dalam sejarah

perjalanannya, Indonesia telah mengalami tiga era kehidupan politik yaitu Orde Lama, Orde Baru serta Reformasi. Pada Orde Lama dan Orde Baru, pemerintahan Indonesia bersifat sentralistik (terpusat). Sentralisasi yaitu pengambilan keputusan atau kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Kondisi pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan peran daerah kurang diberi kekuasaan, maka lahirlah Era Reformasi dimana salah satunya tercipta otonomi daerah.

Reformasi menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia yang mendorong perubahan tata pemerintahan di negeri ini. Pemerintahan Indonesia pada era ini yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemudian terbentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pariwisata diharapkan dapat menunjang meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan/ program pembangunan pariwisata, sebagaimana pembangunan sektor lain pada umumnya, hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak, yaitu: Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masing-masing. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus bersinergi dan melangkah bersama-sama

untuk pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan. Adapun peran dan fungsinya masing-masing pemangku kepentingan tersebut adalah:

- 1) Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya berfungsi sebagai pembuat peraturan (*regulator*) dan pendukung pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.
- 2) Kalangan swasta (pelaku industri pariwisata) berfungsi sebagai pengembang pembangunan kegiatan kepariwisataan.
- 3) Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa kekayaan adat, tradisi, dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah dan pelaku pengembangan kepariwisataan (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011).

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan enam daya tarik wisata, antara lain: Pantai Jatimalang, Goa Seplawan, Kawasan Gegermenjangan, Pantai Keburuhan, Petilasan WR. Soepratman, dan Museum Tosan Aji. Sektor pariwisata Kabupaten Purworejo ditopang oleh ketersediaan alam dan potensi lainnya, akan tetapi hingga saat ini belum terkelola secara maksimal. Pada tahun 2009 arus kunjungan wisatawan turun sebanyak 46,5% menjadi 108.066 wisatawan dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 6,38% menjadi 101.166 wisatawan. Sementara pada tahun 2010 dan tahun 2011 realisasi pendapatan bidang pariwisata tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2010 tingkat pencapaian sebesar 82% yaitu Rp. 183.441.000,00 dan pada tahun 2011 sebesar 83% menjadi Rp. 289.534.000,00. Minimnya pengembangan pariwisata khususnya terkait dengan sarana prasarana/ infrastruktur yang ada, mengakibatkan pariwisata di Kabupaten Purworejo kalah bersaing dengan daerah-daerah yang

berbatasan langsung seperti Kabupaten Kebumen, Magelang, Wonosobo maupun DIY. Masyarakat pun menjadi lebih tertarik untuk mengunjungi obyek wisata yang berada di luar daerah Kabupaten Purworejo. Hal ini berimbas pada arus kunjungan wisatawan yang mengalami ketidakstabilan serta realisasi pendapatan dibidang pariwisata yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pariwisata merupakan urusan pilihan pemerintah dimana berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, akan tetapi berdampak pula pada alokasi anggaran yang diterima.

Berdasar latar belakang kondisi yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis merumuskan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purworejo”, dengan maksud untuk mempelajari bagaimana proses perumusan strategi yang efektif guna mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Purworejo.

B. TUJUAN

1. Mengidentifikasi kondisi pariwisata di Kabupaten Purworejo yang tidak mengalami perkembangan secara signifikan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo.
3. Merumuskan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo.

C. TEORI

1. Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Publik dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami pergeseran paradigma yang berawal dari *Old Public*

Administration (OPA), *New Public Management (NPM)*, hingga paradigma yang digunakan saat ini yaitu *New Public Service (NPS)*. Paradigma OPA menekankan konsep kepentingan publik sebagai sesuatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan. Birokrasi publik harus bertanggung jawab kepada klien dan pemilih. Paradigma NPM menitikberatkan masyarakat sebagai pelanggan (*customers*), sehingga akuntabilitas didasarkan atas kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan pelanggan. Paradigma NPS, memberikan pandangan bahwa birokrasi publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat selaku warga negara (*citizen*), sehingga peran pemerintah adalah menegosiasikan dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas (Denhardt dan Denhardt dalam Agus Dwiyanto, 2008:139).

2. Manajemen Publik

Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2008:8). Manajemen publik menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan yang senyatanya pernah dilakukan oleh para manajer publik di instansi pemerintahan.

3. Strategi

Strategi adalah penempatan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang penting untuk

melaksanakan sasaran (Chandler dalam Triton, 2007:15). Strategi menjadi tulang punggung dari manajemen strategis, keputusan strategis, dan perencanaan strategis.

4. Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan suatu cara pengelolaan organisasi atau program yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan lingkungan internal dari organisasi atau program tersebut. Di dalam manajemen strategis terdapat dua bagian yang saling berhubungan yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan pengelolaan dari hasil perencanaan strategis (Triton, 2007:35).

4.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijaksanaan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan guna menjamin agar kebijaksanaan dan program strategis itu dapat dilaksanakan (Stoner, 2003:167). Tahapan dalam perencanaan strategis, antara lain: analisis lingkungan strategis (internal dan eksternal); identifikasi isu-isu strategis; dan merumuskan strategi untuk mengolah isu.

4.2. Analisis Lingkungan Strategis

Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk

memecahkan masalah (Rangkuti, 2006:14).

Analisis lingkungan terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi. Lingkungan internal organisasi mencakup visi dan misi organisasi, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan lain-lain. Analisis lingkungan eksternal merupakan identifikasi faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi mencakup peluang dan ancaman, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lain-lain.

4.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah jantung dalam perencanaan strategis. Isu strategis merupakan pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan produk atau jasa, klien atau pemakai, biaya, keuangan, organisasi atau manajemen (Bryson, 2007:161).

4.4. Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu

Tahapan yang dilakukan setelah menganalisis lingkungan strategis, dan mengidentifikasi isu-isu strategis adalah merumuskan strategi. Berdasarkan uji tes litmus dimana digunakan untuk mengukur tingkat kestrategisan isu. Rumusan yang menjadi strategi dilihat dari tingkat kestrategisan isu yang bersifat strategis.

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT sebagai alat untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini (Rangkuti, 2006:18).

6. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 10 Tahun 2009).

Menurut Joyosuharto (dalam Soebagyo, 2012:154) pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu: (1) menggalakkan ekonomi; (2) memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup; (3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Berdasarkan laporan dan analisis *World Tourism Organization* (WTO) diperoleh gambaran bahwa sumbangan pariwisata sangat berarti bagi penciptaan lapangan kerja. Disebutkan bahwa dari setiap sembilan kesempatan kerja yang tersedia secara global saat ini, satu diantaranya berasal dari sektor pariwisata (Soebagyo, 2012:155).

D. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan demikian, data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan lain-lain (Moleong, 2007:11). Data diperoleh melalui wawancara menggunakan *interview guide*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Lokus penelitian berada di Kabupaten Purworejo yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Purworejo. Subyek penelitian adalah Kepala Seksi Pengembangan, Kerjasama, dan Pemasaran, Kepala Seksi Penyuluhan, Analisis, Sarana dan Prasarana, Kepala Seksi Obyek, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Staf Bidang Pariwisata, Petugas lapangan salah satu obyek wisata dan Masyarakat. Peneliti berperan sebagai instrument penelitian.

Peneliti mengumpulkan data menggunakan dokumen penunjang (*interview guide*) dan *recorder* sebagai alat bantu dalam melakukan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan menggunakan *interview guide*, dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan, buku, dokumen dan sumber lain. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis SWOT.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, dapat diketahui kondisi kepariwisataan saat ini, serta faktor internal dan faktor eksternal yang berkaitan dengan pengembangan

pariwisata di Kabupaten Purworejo. Pengembangan pariwisata saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengembangan pariwisata difokuskan pada daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Perda No. 4 Tahun 2009, tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Daya saing wisata Kabupaten Purworejo tergolong rendah bila dibandingkan dengan daerah yang berbatasan langsung oleh Kabupaten Purworejo dan di regional Jawa Tengah. Arus kunjungan wisatawan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2006-2011 mengalami peningkatan dan penurunan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Lingkungan internal merupakan lingkungan dalam organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) untuk mencapai tujuan organisasi. Lingkungan internal dapat dilihat dari visi, dan misi organisasi, pengelolaan dan pengembangan pariwisata, sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur yang ada. Kekuatan (*strengths*) dalam organisasi meliputi:

- a. Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi.
- b. Pelaksanaan misi guna mencapai visi
- c. Kegiatan pengelolaan pariwisata (pemeliharaan sarana prasarana dan kegiatan operasional).
- d. Penggunaan media informasi sebagai promosi wisata.

Kelemahan (*weaknesses*) yang berasal dari dalam organisasi, antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi lintas instansi dalam pengembangan pariwisata.
- b. Terkendalanya program pengembangan pariwisata (sarpras dan infrastruktur).
- c. Anggaran dinas yang minim.
- d. Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai.

- e. Belum ada pelatihan kepariwisataan untuk peningkatan kompetensi.
- f. Sarana pendukung pariwisata terbatas.

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi dan diidentifikasi melalui faktor politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan kelompok sadar wisata. Lingkungan eksternal mencakup peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang berasal dari luar organisasi. Peluang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo, meliputi:

- a. Sistem pemerintahan yang kondusif.
- b. Tersedia Perda yang mengatur pariwisata.
- c. Pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata.
- d. Karakteristik sosial budaya menarik kunjungan wisatawan.
- e. Partisipasi masyarakat.

Ancaman (*threats*) yang berasal dari luar organisasi, antara lain:

- a. Belum terjalin kerjasama dengan berbagai sektor usaha.
- b. Kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan masih kurang.
- c. Belum optimalnya kegiatan Pokdarwis

Terkait dengan analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo. Faktor-faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo bersumber dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari internal serta peluang-peluang yang berasal dari lingkungan luar. Identifikasi faktor-faktor pendukung tersebut, antara lain: Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi; Pelaksanaan misi guna mencapai

visi; Kegiatan pengelolaan pariwisata (pemeliharaan dan kegiatan operasional); Media informasi sebagai promosi wisata; Sistem Pemerintahan yang kondusif; Adanya Perda yang mengatur pariwisata; Pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata; Karakteristik sosial budaya menarik kunjungan wisatawan; Partisipasi masyarakat.

Faktor penghambat dalam optimalisasi strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo berasal dari kelemahan-kelemahan lingkungan internal maupun ancaman-ancaman lingkungan eksternal. Berdasar hal tersebut, maka identifikasi faktor-faktor penghambat antara lain: Kurangnya koordinasi lintas instansi dalam pengembangan pariwisata; Terkendalanya program-program pengembangan pariwisata; Minimnya anggaran dinas; Kualitas dan kuantitas SDM yang kerang memadahi; Belum ada pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi SDM; Sarana pendukung pariwisata yang belum optimal; Belum ada kerjasama dengan berbagai sektor usaha; Belum optimalnya pembentukan kelompok sadar wisata.

B. ANALISIS

Tahapan selanjutnya, setelah menganalisis lingkungan internal dan eksternal adalah mengidentifikasi isu-isu strategis menggunakan matriks SWOT, untuk memperoleh strategi S-O, S-T, W-O, dan W-T. Isu-isu strategis tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi S-O
 - a) Peningkatan promosi wisata melalui kearifan lokal masyarakat untuk menarik kunjungan wisatawan.
 - b) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga keswadayaan.
2. Strategi S-T
 - a) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap

program-program pengembangan pariwisata.

- b) Peningkatan peran Pokdarwis dalam pengelolaan pariwisata.
3. Strategi W-O
 - a) Peningkatan koordinasi atau sinkronisasi lintas dinas dalam pengembangan pariwisata.
 - b) Rekrutmen pegawai berbasis kepariwisataan.
 4. Strategi W-T
 - a) Menjalin kerjasama dengan berbagai sektor usaha dalam program-program pengembangan pariwisata.
 - b) Optimalisasi pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata untuk peningkatan kualitas SDM.

Isu-isu strategis tersebut selanjutnya diuji menggunakan Tes Litmus untuk mengukur tingkat kestrategisan. Rumusan strategi setelah diuji menggunakan tes litmus, antara lain: Menjalin Kerjasama dengan Berbagai Sektor Usaha; Optimalisasi Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk Peningkatan Kualitas SDM; Peningkatan Koordinasi atau Sinkronisasi Lintas Dinas dalam Pengembangan Pariwisata; Peningkatan Promosi Wisata melalui Kearifan Lokal Masyarakat; Rekrutmen Pegawai Berbasis Kepariwisataan; Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengelolaan Pariwisata. Program-program strategis kemudian disusun guna menunjang strategi yang dirumuskan, tiga strategi teratas adalah sebagai berikut:

- 1. Menjalin Kerjasama dengan Berbagai Sektor Usaha**
 - a. Memberi kejelasan status tanah, Hak Pengguna Lahan (HPL) milik

- pemerintah (tanah GG/ *Ground Government*).
- b. Membuat site plan atau peta wisata yang jelas berupa *Detail Engineering Design* (DED).
 - c. Mempermudah prosedur perijinan
 - d. Menciptakan suasana kondusif di lingkungan masyarakat
- 2. Optimalisasi Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk Peningkatan Kualitas SDM**
- a. Penyuluhan dari pihak Pemerintah/dinas terkait kepada masyarakat.
 - b. Pembentukan dan pembinaan Pokdarwis.
 - c. Pokdarwis memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membudayakan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan)
 - d. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata dengan produksi makanan, minuman, dan cinderamata khas lokal.
 - e. Mengumpulkan, mengolah, dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan (membuat *Tourist Information Centre*) di daya tarik wisata.
 - f. Menjadikan perantara antara Pemerintah dan wisatawan terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di lapangan.
- 3. Peningkatan Koordinasi atau Sinkronisasi Lintas Dinas dalam Pengembangan Pariwisata**
- a. Pembentukan tim penataan kawasan wisata melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
 - b. Pembatasan lingkup atau wilayah pekerjaan masing-masing dinas.
 - c. Sosialisasi bersama program pengembangan kawasan wisata lintas dinas.
 - d. Meningkatkan arus koordinasi lintas dinas.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasar pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diketahui kondisi kepariwisataan di Kabupaten Purworejo yang belum mengalami perkembangan. Daya saing wisata tergolong rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya, termasuk di regional Jawa Tengah. Arus kunjungan wisatawan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2006-2011 mengalami ketidakstabilan.

Analisis lingkungan internal dan eksternal, menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi. Terkait dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo.

Tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu mengidentifikasi isu-isu strategis, dimana terdapat delapan isu. Isu-isu tersebut, kemudian diuji menggunakan Tes Litmus untuk mengetahui tingkat kestrategisan isu. Isu-isu yang masuk klasifikasi strategis, dirumuskan menjadi strategi-strategi yang didukung dengan program-program yang menunjang. Rumusan strategi setelah diuji menggunakan tes litmus, antara lain: Menjalin Kerjasama dengan Berbagai Sektor Usaha; Optimalisasi Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk Peningkatan Kualitas SDM; Peningkatan Koordinasi atau Sinkronisasi Lintas Dinas dalam Pengembangan Pariwisata; Peningkatan Promosi Wisata melalui Kearifan Lokal Masyarakat; Rekrutmen Pegawai Berbasis Kepariwisataan; Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengelolaan Pariwisata.

B. REKOMENDASI

Berkaitan dengan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo, perlu adanya perbaikan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, sehingga arus kunjungan dapat meningkat tiap tahunnya serta tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lain dalam regional Jawa Tengah. Pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan, diperlukan sinergitas dan koordinasi antar SKPD. Ada pun instansi yang menjadi sasaran dalam tiap rumusan strategi, antara lain:

- a. Meningkatkan arus koordinasi lintas dinas untuk menyelaraskan dan mensinergikan tujuan dan arah pembangunan kawasan wisata. Adapun instansi yang menjadi sasaran antara lain: Dinhubkominpar; Dinas PU; Dinas Perikanan dan Kelautan; dan Bappeda
- b. Menjalinkan kerjasama atau program kemitraan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai sektor usaha dalam mengatasi minimnya anggaran dinas yang dimiliki. Di dalam hal ini perlu adanya sinergi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinhubkominpar; Bappeda; KPPT; dan Pihak Ketiga/Investor
- c. Mengadakan pelatihan-pelatihan guna mendapatkan sertifikasi standard kompetensi di bidang pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM. Rekrutmen pegawai berbasis pendidikan kepariwisataan diharapkan mampu mengatasi kuantitas SDM yang ada. Terkait hal ini, perlu adanya koordinasi antara Dinhubkominpar, BKD bersama sekolah/ universitas/ Akademi berbasis pariwisata, sehingga lulusan-lulusan kepariwisataan dapat direkrut.
- d. Memperbaiki dan mengembangkan sarana prasarana/ infrastruktur yang ada memelihara sarana pendukung demi kenyamanan dan keamanan

wisatawan atau pengunjung yang datang.

- e. Melakukan pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan mengoptimalkan peran serta pelaksanaan program bersama Dinhubkominpar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bryson, John M. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Triton P.B. 2007. *Manajemen Strategis: Terapan Perusahaan dan Bisnis*. Yogyakarta: Tugu Publisher
- Widiatedja, IGN Parikesit. 2010. *Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita*. Bali: Udayana University Press

Non-Buku:

- Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata. 2011. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo sebagai Daya Tarik Wisata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata